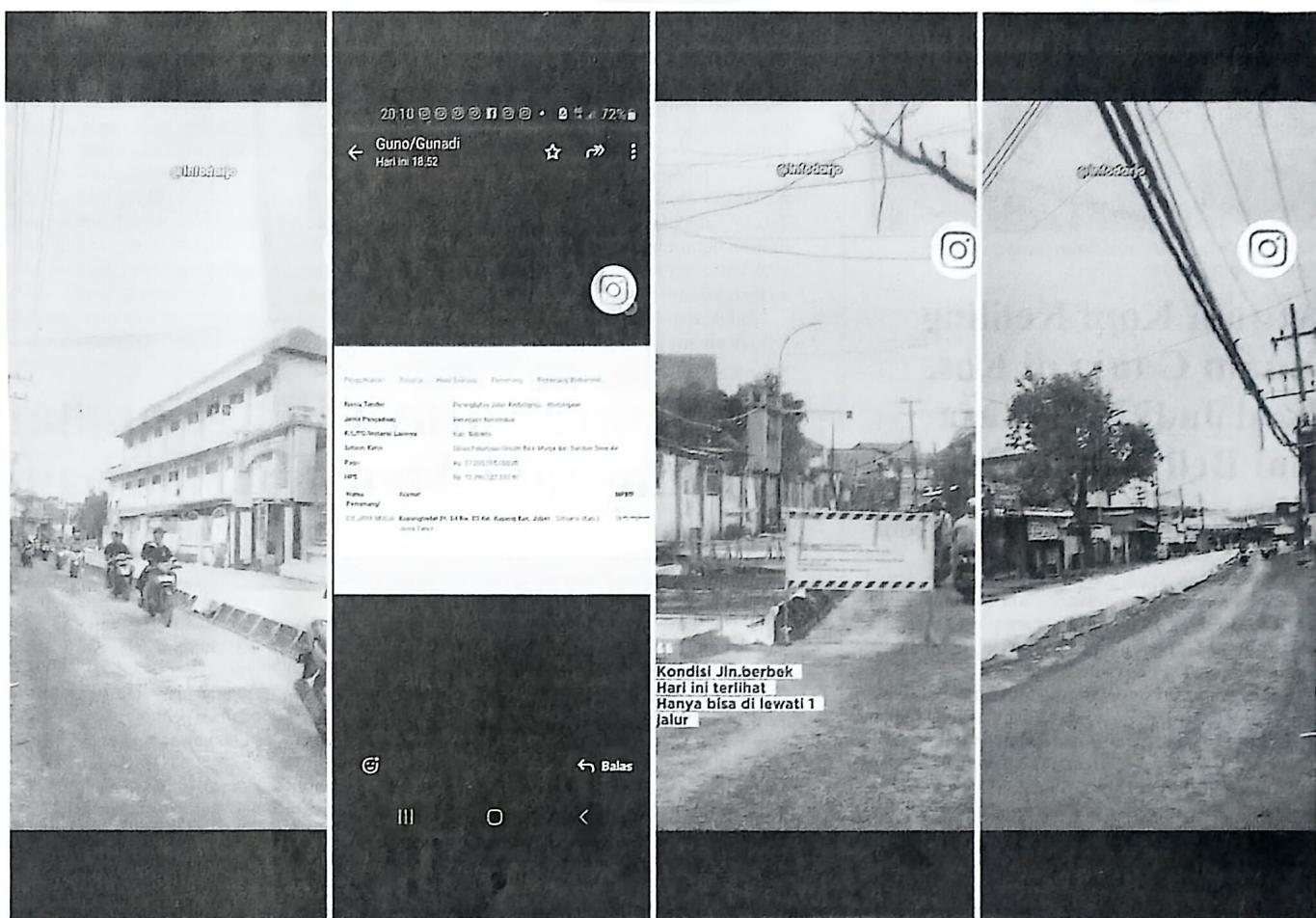




INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Proyek Peningkatan Jalan Kedungrejo-Wandungasri Mangkrak

Sidoarjo, Pojok Kiri,-
Proyek Peningkatan Jalan Betonisasi Kendungrejo- Wandungasri senilai 12 miliar dari pagu 17 miliar kini mangkrak

tidak selesai pada waktunya Desember 2025 sehingga badan jalan tinggal separuh, kritik GN pada wartawan, Minggu, 25/1/26. Sedangkan Ir.Joko saat dikonfir-

masi wartawan tentang proyek tersebut, ia membisu tidak menjawab satu kata pun via WhatsApp, Minggu, 25/1/26. Proyek yang dikerjakan oleh

CV Jaya Mulya beralamat di Kupangbader Jabon empunya Deby saat hendak dikonfirmasi wartawan melalui telepon nya ternyata nomor HP Kabiro, HR

Pojok Kiri, H Abdul Kholid diblokir, sehingga wartawan tidak bisa mendapatkan info proyek mangkrak senilai 12 miliar lebih ini. (Khol bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Besok Alun-Alun ...

Ia menambahkan, kehadiran petugas bukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan men-

jaga harmoni antara keindahan fasilitas baru dan ketertiban umum.

“Kami akan melaksanakan pengamanan bersama rekan-rekan dari Dishub. Lahan parkir akan dikelola

Dishub, sementara Satpol PP fokus mengamankan area dari PKL dan hal-hal lain yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung,” pungkasnya. (dik/vga)

Desa Gelam ...

Ia menambahkan, tradisi ini juga menjadi sarana memohon keberkahan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi warga.

“Kita bersyukur atas para dayang dan sesepuh yang babat alas Desa Gelam. Kita doakan agar pertanian Desa Gelam dan perekonomian masyarakat tidak terguncang serta dijauhkan dari situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.

Rangkaian ruwah desa dimulai sejak pagi hari. Sejak pukul 05.00 digelar istighosah hingga pukul 08.30, dilanjutkan tumpengan bersama RT/RW, lembaga desa, serta ziarah makam leluhur.

Siang harinya, wayang ruwah digelar hingga sore, lalu malam hari diisi shalawat, grebek tumpengan, dan puncaknya pagelaran wayang kulit dengan lakon

Babat Alas Seno.

“Tujuan utamanya menjaga adat budaya dan kearifan lokal agar tidak hilang. Gotong royong, adat istiadat, dan toleransi antarumat beragama harus terus kita jaga,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi ketahanan pangan desa yang mulai berkembang melalui berbagai program warga.

“Alhamdulillah masyarakat kita guyub rukun. Di tingkat RT sudah ada hidroponik, perikanan, peternakan kambing dan ayam,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Gelam Slamet Rizal menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran seluruh rangkaian acara yang didukung cuaca cerah dan antusiasme warga.

“Alhamdulillah sejak habis salat subuh acara berjalan lancar. Setelah Khotmil Qur'an, kami bersama BPD,

RT/RW, perangkat desa melakukan ziarah kubur ke makam Desa Gelam dan Dusun Pagerwaja hingga ke mbah buyut kunden desa,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pagelaran wayang kulit menghadirkan dua dalang, yakni dalang ruwatan pada siang hari dan dalang Hasan yang melanjutkan pagelaran hingga malam. “Antusiasme warga luar biasa, terutama saat gerebek gunungan. Warga sangat semangat dan semuanya hadir,” ujarnya.

Menurut Slamet Rizal, ruwah desa menjadi momentum penting untuk mempererat persatuan warga lintas usia. “Tujuannya menggalang persatuan dan kerukunan. Dari orang tua, sesepuh, hingga remaja putra-putri berkumpul bersama. Bahkan para remaja ikut dekor gunungan, terlihat jelas tua dan muda bisa kompak,” pungkasnya. (dik/vga)

**RADAR
SIDOARJO.ID**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

RELOKASI: Car Free Day di Jalan Ponti berakhir kemarin (25/1). Seluruh pedagang diminta untuk pindah ke alun-alun.

CFD Ponti Digeser ke Alun-Alun, 500 Pedagang Ikut Pindahan

Dishub Kembalikan Fungsi Jalan

SIDOARJO- Kemarin (25/1) merupakan edisi terakhir *Car Free Day* (CFD) di Jalan Ponti, Mager-sari. Sebab mulai 1 Februari, pelaksanaan CFD bakal dipindahkan ke kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Termasuk 500 pedagang yang berjualan saat CFD.

Sosialisasi terkait pemindahan sudah dilakukan. Jalan Ponti nan-

tinya akan difungsikan sebagai jalur alternatif lalu lintas setiap hari Minggu. Sehingga, tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, Jalan Ponti disiapkan sebagai jalur pengalihan arus kendaraan dari arah utara ke selatan maupun sebaliknya. "CFD dipindahkan ke alun-alun dan lalu lintas sudah ditata," katanya kemarin (25/1).

Seiring penutupan CFD, aktivitas pedagang di Jalan Ponti tidak lagi

diperbolehkan. Seluruh pedagang yang berjumlah 500 lebih itu dia-rahkan untuk berjualan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Langkah itu ditempuh untuk menjaga fungsi Jalan Ponti tetap optimal.

"Kami akan menurunkan per-so-
nil di sepanjang Jalan Ponti pada 1 Februari," ujarnya. Mereka akan bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus memastikan tidak ada aktivitas CFD maupun pedagang. Pengawasan dilakukan selama pelaksanaan CFD di alun-alun. (ful/hen)

Jawa Pos

Tertibkan Pasar Tumpah Sekitar Flyover Waru

SIDOARJO- Pasar tumpah Kedungrejo di sekitar flyover Waru ditertibkan Satpol PP Sidoarjo kemarin (25/1) pagi. Penertiban dilakukan karena pedagang dan pembeli memakan hampir seperempat ruas jalan Surabaya-Sidoarjo serta menyebabkan kemacetan. Ada belasan pedagang yang ditertibkan. Mereka diminta untuk berpindah ke lokasi. Meski sempat ada adu mulut, namun seluruh pedagang akhirnya mengalah.

Kasidalops Satpol PP Sidoarjo R. Novianto Koesno mengatakan, pasar tumpah mulai muncul pukul 23.00 dan berlanjut hingga pagi hari sekitar pukul 05.00. "Kami dibantu TNI dan meminta PKL membereskan lapaknya," katanya.

Menurut Novianto, aktivitas PKL di lokasi tersebut dinilai menyalahi aturan karena membuat macet. Pemerintah, lanjut Novianto, sebenarnya telah menyediakan lokasi berjualan yang representatif bagi pedagang. Yakni di Pasar Kedungrejo Baru. "Namun sebagian pedagang masih enggan berpindah," katanya. (eza/hen)

SEBABKAN MACET:
Anggota Satpol PP Sidoarjo meminta pedagang di pasar tumpah sekitar flyover Waru untuk berpindah kemarin (25/1) pagi.



DOK. SATPOL PP SIDOARJO



DOK. POLSEK SUKODONO

PENYOK: Anggota Polsek Sukodono menunjukkan truk yang ditabrak.

Diduga Mengantuk, Pemotor Tabrak Truk Parkir

SIDOARJO- Nasib malang menimpa Moch Chairil Anwar Hasan, Warga Desa Suruh, Sukodono. Pemuda berusia 23 tahun itu meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Raya Anggaswangi, Sabtu (24/1) malam.

Kanit Lantas Polsek Sukodono Ipda Agung Legowo mengatakan, peristiwa kecelakaan terjadi pukul 22.30. "Motor korban melaju dari arah barat ke timur. Sesampai di lokasi, korban menabrak truk fuso Mitsubishi yang parkir di pinggir jalan," katanya.

Tidak hanya faktor kondisi

jalan yang sempit. Agung mengatakan jika korban juga diduga mengantuk saat berkendara. "Akibat benturan keras, korban mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke RS As-sakinah Medika Sukodono. Namun meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit," tambah Agung.

Dia menegaskan jika polisi sudah melakukan olah TKP. Beberapa saksi juga diperiksa. Untuk mencegah kejadian serupa, polisi telah mengimbau agar truk tak parkir di pinggir jalan. (eza/hen)

Jawa Pos



Musrenbang Kecamatan Gedangan 90 Persen Usulan Pembangunan Fisik

Sidoarjo, Bhirawa

Camat Gedangan, Asmara Hadi SSTP MAP, mengatakan usulan Musrenbang tahun 2027 di Kecamatan Gedangan, yang berasal dari 15 desa di wilayah kecamatan itu, hampir 90 persen berupa pembangunan fisik.

“Kami bangga, semua desa sudah mengusulkan usulan pembangunan di tempatnya masing-masing, semoga bisa terealisasi semua,” komentar Hadi, disela-sela, melakukan kegiatan Musrenbang tahun 2027 kecamatan Gedangan, belum lama ini.

Hadir dalam acara Musrenbang yang digelar di aula rapat Kecamatan Gedangan tersebut, para Kades di 15 desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dan OPD terkait seperti Bappeda Sidoarjo, Dinas PERKIM, Dishub dan Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo. Serta dihadiri anggota DPRD Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih.

Hadi memberikan semangat kepada para pemimpin desa di Kecamatan Gedangan, untuk terus membangun desanya masing-masing. Tanpa mereka pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo tidak akan bisa maksimal.

Menurut Hadi, usulan yang diajukan oleh 15 desa, jelas berbeda beda. Sesuai dengan geografis dan kebutuhan desa yang bersangkutan. Total usulan Musrenbang tahun 2027 di kecamatan Gedangan, kata Asmara Hadi, ada sebanyak 162 usulan.

“90 persen usulan bersifat fisik, sisanya bersifat pemberdayaan, semoga bisa terealisasi seperti yang diharapkan,” kata mantan Camat Tulangan itu.

Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan itu sempat mengatakan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gedangan akan dibangun penerangan jalan Umum. Diantaranya seperti di Desa keboansikep, gemurung, Punggul dan Semambung.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih, yang hadir untuk memberikan semangat bagi pemimpin desa di Kecamatan Gedangan dalam membangun desa tersebut, mengatakan usulan pembangunan dari desa yang diusulkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sedang dialami warga desa. [kus.dre]

Pembuatan BPKB Duplikat Terkendala Kelengkapan Dokumen

SIDOARJO- Sebanyak 147 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dinas milik Pemkab Sidoarjo yang hilang belum ditemukan. Pemkab berencana menerbitkan BPKB duplikat. Namun upaya itu terkendala dokumen yang belum lengkap.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Chusnul Inayah mengatakan, belum adanya pengajuan duplikat disebabkan dokumen dari OPD dan kecamatan pengguna kendaraan belum lengkap. BPKAD belum bisa memproses

lebih lanjut sebelum seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. "Hingga saat ini, kami masih terus berkoordinasi dengan OPD dan kecamatan," katanya kemarin (25/1).

Dia menjelaskan, penerbitan BPKB duplikat mensyaratkan dokumen berlapis. Di antaranya laporan kehilangan, kartu induk BPKB, pengumuman di media massa, serta verifikasi fisik kendaraan. Proses verifikasi tersebut dilakukan melalui Samsat dan Polda.

Chusnul menambahkan, penyelesaian administrasi menjadi kunci agar pengu-



ANGGER BONDAN/JAWA POS
PELAT MERAH: Pemkab berencana membuat duplikat BPKB kendaraan dinas yang belum ditemukan.

rusan duplikat BPKB bisa segera berjalan. Langkah tersebut juga diperlukan untuk menuntaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) sejak 2022. "Kami berharap seluruh dokumen bisa segera dilengkapi agar persoalan tidak berlarut," harapannya. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kementerian

Kabinet Merah Putih

HALAMAN 8

Jawa Pos • SENIN 26 JANUARI TAHUN 2026

BERI
DUKUNGAN:
Menko IPK Agus
Harimurti
Yudhoyono (dua
dari kanan) dan
Menteri Ekraf
Teuku Rieky
Harsya (dua
dari
kiri) menghadiri
Atas Langit
Festival
Grand
Opening,
Ceremony Fun
Run & Creative
Experience
di Sentul, Jabar,
Sabtu (24/1).



KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF

Kolaborasi Pemerintah–Pelaku Usaha Percepat Pengembangan Ekonomi Kreatif

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Rieky Harsya, menghadiri Atas Langit Festival: Grand Opening, Ceremony Fun Run & Creative Experience di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (24/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Ekraf untuk terus mendorong pengembangan ruang-ruang kreatif sebagai penggerak ekonomi baru, khususnya dari subsektor kuliner dan gaya hidup sehat.

Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa infrastruktur memiliki peran

penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk subsektor kuliner dan food and beverages yang dinilai memiliki potensi kreativitas tanpa batas.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Ekraf yang menangani 17 subsektor, begitu banyak elemen dan pemangku kepentingan yang semakin maju, semakin kolaboratif, dan semakin berkelanjutan. Kita harus bangga dengan ragam produk dan kuliner lokal yang siap mendunia. Kolaborasi hari ini menjadicontoh kecil bahwa kebersamaan lintas sektor pasti memiliki daya jangkau yang lebih luas,” tutur Menko IPK, AHY.

Atas Langit Café and Space mengusung konsep ruang ter-

buka dan amfiteater yang menyatu dengan alam. Kehadirannya tidak hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi kreatif masyarakat, tetapi juga menjadikan ruang berekspresi dan berkreasi.

“Kami merasa bangga dan mengapresiasi Atas Langit Festival yang diinisiasi oleh Pengusaha Harapan Bangsa (PHB) dan rekan-rekan HIPMI, khususnya HIPMI Culinary Indonesia (HCI), yang mengombinasikan acara grand opening ini dengan sangat kreatif. Tentu Atas Langit Café and Space tidak sekedar menampilkan pengalaman, tetapi juga memfasilitasi para pegiat ekonomi kreatif termasuk pekerja gig economy, untuk berkreasi,” ujar

Menko IPK. Kehadiran lintas kementerian dalam pembukaan kafe ini menjadi bentuk dukungan sekaligus tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan bersama manajemen PHB pada 9 Januari 2026 untuk pengembangan ruang-ruang kreatif yang menarik lintas generasi. “Saya merasakan Atas Langit Café and Space sangat unik. Percaya bahwa kafe ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap ekonomi kreatif. Ke depan, tentu kami siap berkolaborasi mengaktifkan kafe ini untuk kegiatan lokal-karya, pelatihan, dan kegiatan kreatif lainnya,” ucap Menteri Ekraf Teuku Rieky. (raf/all)

JAKARTA – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan pensiun mencapai angka yang cukup besar. Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widayanti meminta agar masa purna bakti disiapkan sejak jauh hari.

Rini menyebutkan bahwa jumlah ASN di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 6,5 juta orang. Angka tersebut tersebar di berbagai kelompok usia. Dari jumlah itu, sekitar 13 persen atau lebih dari 800 ribu ASN akan memasuki masa purna bakti dalam lima tahun ke depan. Secara nasional, kata dia, kondisinya sejalan dengan dinamika demografi Indonesia yang bergerak menuju ageing populasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia (SDM), angka ini mencerminkan tantangan tersendiri, baik terkait keberlanjutan kapasitas SDM ASN maupun kesejahteraan ASN pascapurna bakti.

“Namun, pada saat yang sama, angka ini juga menunjukkan potensi yang besar. Sebab, banyak ASN memasuki masa purna bakti dalam kondisi masih produktif berpengalaman

KEMENTERIAN PANRB

Lima Tahun ke Depan, 800 Ribu ASN Pensiun



“Purna bakti tidak cukup dipahami sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi sebagai fase kehidupan yang perlu disiapkan secara lebih menyeluruh.”
Rini Widayanti
Menteri PANRB

an, dan memiliki jejak yang kuat” paparinya dalam keterangan resmi, Minggu (25/1).

Ia menyakini, apabila potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, purna bakti ASN akan memberikan dampak besar. Tidak hanya bagi kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan aktivitas ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.

Namun sayangnya, lanjut dia, banyak pegawai ASN yang cenderung mengalami penurunan *well-being* dan kepuasan hidup. (mla/all)

rakan perjalanan awal kariernya, seperti CPNS, pengangkatan, dan promosi jabatan. Sangat jarang pegawai yang menyiapkan masa purna bakti, padahal fasilitas ini pasti akan dialami.

“Dan masa purna bakti ini memang sering digambarkan sebagai masa yang tricky, karena tantangannya justru tidak sedeharan dan tidak selalu terlihat di permukaan,” paparinya.

Menurutnya, masa purna bakti tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga pada kesehatan mental, relasi sosial, dan rasa kebermaknaan hidup. Berbagai studi di bahkan menunjukkan bahwa ketidaksiapan nonfinansial dalam transisi pensiun berkontribusi pada menurunnya kesejahteraan dan partisipasi sosial di usia lanjut.

“Artinya meskipun kebutuhan finansial relatif tercukupi, tanpa kesadaran mental dan sosial, fase ini tetap bisa terasa berat,” tegasnya.

Individu yang mengalami kehilangan peran dan rutinitas kerja tanpa transisi yang baik, sebutnya, cenderung mengalami penurunan *well-being* dan kepuasan hidup. (mla/all)

Jawa Pos

Dana Pilkades Belum Cair, Panitia Terpaksa Menalangi

Sebagian Pakai Anggaran Desa

SIDOARJO- Sejak ditetapkan 2 Januari, panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) sudah hampir sebulan bekerja. Muncul permasalahan terkait anggaran. Sebab hingga saat ini, dana pembiayaan Pilkades dari APBD belum dicairkan.

Dari informasi, panitia terpaksa menalangi. Ada yang memakai dana pribadi. Sebagian memanfaatkan dana desa. Adapun pengeluaran dipakai untuk pembuatan surat, spanduk, dan operasional.

Tahapan Tetap Jalan

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Hernita Hadi Lestari tak menampik soal adanya keluhan tersebut. Dana panitia Pilkades memang belum diterima desa. Padahal, dana tersebut dibutuhkan untuk membiayai seluruh rangkaian tahapan Pilkades.

"Panitia terpaksa mencari solusi sementara agar tahapan tetap berjalan," katanya. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sangat penting untuk membiayai kebutuhan panitia Pilkades. Mulai dari operasional panitia hingga persiapan administrasi. Kondisi ini dikhawatirkan membebani keuangan desa bila pencairan anggaran terus tertunda.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SOSIALISASI: Spanduk berisi pemberitahuan terkait Pilkades terpasang di Balai Desa Sido Kepung, Buduran.

DANA PILKADES SERENTAK

- Bersumber dari APBD 2026
- Anggaran untuk seluruh tahapan
- Nilai mengacu kebutuhan masing-masing desa
- Pencairan diawali pengajuan dari desa

Sumber: Berbagai Informasi



“Panitia terpaksa mencari solusi sementara agar tahapan tetap berjalan.”

Hernita Hadi Lestari
Kepala Bidang Pembinaan
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
DPMD Sidoarjo



“Butuh tanda tangan Bu Sekda. Beliau cuti ke London menghadiri wisuda anaknya.”

Riza Ali Faizin
Ketua Komisi A
DPRD Sidoarjo

"Sekda. Beliau cuti ke London menghadiri wisuda anaknya," katanya. Riza menambahkan, peraturan bupati yang menjadi dasar pencairan anggaran juga telah selesai disusun. Saat ini regulasi tersebut tinggal menunggu proses perundangan. "Penjelasan terakhir. Besok (Senin, Red) semuanya sudah klir dan besok lusa (Selasa, Red) bisa dicairkan," pungkasnya. (ful/hen)

Tunggu Tanda Tangan Sekda

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Riza Ali Faizin mengaku telah memanggil berbagai pihak terkait hal itu. Sudah ada aduan ke DPRD terkait keterlambatan administrasi. Legislator meminta masalah segera dituntaskan.

"Butuh tanda tangan Bu



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIDUGA PROYEK BODONG JALAN PAVING DI PERUM TAMAN PINANG SIDOARJO

Sidoarjo, Pojok Kiri,-
Keberadaan proyek pavingisasi dan taman di Perumahan Taman Pinang Indah menjadi sorotan media, pasalnya pada awal bulan Januari 2026 kok sudah muncul proyek, ucap SL salah satu pemerhati proyek pada wartawan, Minggu,25/1/26.Dia juga menuturkan proyek itu diduga siluman tidak ada papan namanya,trus dana bersumber dari mana,katanya. Sementara Kadis P2 CKTR Kabupaten Sidoarjo, Ir.H.Bakruni Ar-mawan saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek pav-

ingisasi dan taman di TPI, Via WhatsApp,Minggu,25/1/26, ia tidak tahu soal proyek itu dan ia mengarahkan wartawan konfirmasi ke bagian bidang Perkim, Ir Budiarto. Sedangkan Kadid Perkim, Ir.Budiarto saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek pavingisasi dan taman serta box culvert di Taman Pinang (

ingisasi dan taman di TPI, Via WhatsApp,Minggu,25/1/26, ia tidak tahu soal proyek itu dan ia mengarahkan wartawan konfirmasi ke bagian bidang Perkim, katanya. Sedangkan Sekel Lemahputro,Arif Purnama saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek pavingisasi dan taman serta box culvert di Taman Pinang (

pavingisasi dan taman dan gorong-gorong serta Gapuro, ia menjawab bukan proyek Perkim,katanya. Sedangkan Sekel Lemahputro,Arif Purnama saat dikonfirmasi wartawan terkait proyek pavingisasi dan taman serta box culvert di Taman Pinang (

TPI), ia juga tidak tahu,jawa-bannya pada wartawan via WhatsApp .Begitu pula apa proyek itu pakai dana urunan Perum TPI,ia pun menjawab tidak ada info.Menurutnya Fasum TPI belum diserahkan ke Pemkab Sidoarjo,katanya. (Khol bersambung)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



CEKATAN SIM Polresta Sidoarjo Bikin Pemohon Lulus Sekali Coba

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Satlantas Polresta Sidoarjo melaksanakan program CEKATAN SIM (Cepat Tingkatkan Kemampuan Ujian Praktik Surat Izin Mengemudi), sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya calon pemohon Surat Izin Mengemudi. Program ini berfokus pada pemberian pelatihan dan pendampingan bagi pemohon SIM agar lebih siap menghadapi ujian praktik.

Dalam pelaksanaannya, para peserta diberikan pemahaman sekaligus diajari secara langsung tata cara pelaksanaan ujian praktik SIM. Pelatihan dilakukan di lintasan ujian praktik menggunakan kendaraan yang digunakan saat ujian, serta didampingi langsung oleh petugas penguji. Program CEKATAN SIM digelar secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 15.00 hingga 16.00 WIB.

Salah satu peserta, Vega Fisabilihan (27 tahun), warga Sidoarjo, mengaku program ini sangat membantu dirinya dalam memahami materi ujian praktik. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, Vega berhasil lulus ujian praktik SIM hanya dalam satu kali percobaan.

Kapolresta Sidoarjo melalui Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Jodi Indrawan, menjelaskan bahwa program CEKATAN SIM digagas sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam menghadapi ujian praktik Surat Izin Mengemudi.

“Program CEKATAN SIM ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti ujian praktik SIM. Harapannya, tidak ada lagi kendala bagi pemohon untuk mengurus SIM secara mandiri dan kesadaran tertib berlalu lintas dapat terus meningkat,” tutur Kompol Jodi Indrawan.

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang diberikan, calon pemohon SIM diharapkan mampu mengikuti seluruh tahapan ujian praktik dengan baik dan benar. Program ini juga bertujuan mendorong masyarakat agar mengurus SIM secara mandiri, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib serta keselamatan dalam berlalu lintas. (Khol/Fs)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Masih Dalam Raperda Terkait Fasilitasi Pesantren

Redaksi QB 5 Min Read 22 Januari 2026



Sidoarjo, Arjunausantarane.com, - DPRD Sidoarjo masih dalam Raperda terkait fasilitasi pesantren. Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo rapat ke-tiga masa persidangan ke dua tahun sidang 2026. DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna dengan agenda "Penyampaian Jawaban Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo atas Pendapat Bupati Sidoarjo Terhadap Raperda Tentang Fasilitasi Pesantren" pada Hari Kamis (22/1/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, Anggota DPRD, komandan kesatuan TNI dan polri atau yang mewakili seluruh jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kepala instansi vertikal, direktur BUMN dan BUMD kepala cabang, ketua KPU dan Bawaslu, kepala BNNK Sidoarjo, Ketua MUI, rektor perguruan tinggi, pimpinan partai politik, wartawan dan LSM.

Dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan, terima kasih kepada seluruh hadirin khususnya kepada Bupati Sidoarjo yang telah memenuhi undangan. Dengan rapat tersebut telah ditawarkan untuk pembacaan jawaban atas pendapat Bupati terhadap Raperda tersebut. Maka disepakati pembacaan yang di wakili oleh Fraksi PKS - PPP.

Jawaban telah dibacakan oleh H. Afdal Muhammad Ihsan dari Fraksi PKS - PPP atas pendapat Bupati terhadap Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang fasilitasi Pesantren, berikut :

Pembahasan Rancangan peraturan daerah tentang fasilitas di pesantren, ini jadi momentum Detective yang mengingatkan kita semua pada musibah yang terjadi di pondok pesantren al-khoziny. Peristiwa tersebut bukan semata-mata merupakan dukacita tetapi menjadi panggilan moral bagi kita bersama khususnya bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kebijakan untuk semakin memperkuat perhatian terhadap aspek keselamatan kesejahteraan dan keberlangsungan pesantren.

Rancangan peraturan daerah yang telah kita bahas ini memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai instrumen kebijakan mampu memberikan perlindungan dan dukungan nyata bagi Pesantren singkat tragedi tidak kembali terulang di masa yang akan datang.

Setelah mengkaji dan melakukan pembahasan terhadap pendapat Bupati atas Rancangan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo tentang fasilitasi Pesantren, maka kami Fraksi PKS - PPP menyampaikan jawaban sebagai berikut :

•Bawa Fraksi PKS - PPP mengapresiasi sikap Bupati Sidoarjo yang secara substansial telah memandang Pesantren sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah baik dalam aspek pendidikan sosial maupun ekonomi pandangan ini sejalan dengan posisi Fraksi PKS - PPP sejak awal menempatkan pesantren sebagai pilar strategis pembangunan sumber daya manusia moral dan kesejahteraan masyarakat.



• Fraksi PKS – PPP menilai pendapat Bupati telah menegaskan pentingnya keberpihakan daerah terhadap pesantren, fraksi mendorong agar Raperda secara tegas memuat instrumen pelaksanaan bukan hanya prinsip umum karena fraksi menilai bahwa selama ini dukungan pemerintah daerah masih bersifat sektoral dan kreatif sehingga Raperda perlu memastikan adanya; a. model fasilitasi terpadu yang lintas OPD, b. Keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), c. Serta Rencana Aksi Daerah (RAD) administrasi pesantren. Tanpa hal tersebut Misi besar Bupati tidak mangkus minta pelaksanaan.

• Fraksi PKS – PPP menilai bahwa dukungan pemerintah Sidoarjo memfokuskan titik unsur pesantren, a. Kyai sebagai pimpinan dan guru pesantren, b. Santri dan kurikulum sebagai inti proses pendidikan, c. Sarana prasarana sebagai ruang pembelajaran dan pembinaan. Pendapat Bupati telah menyebut santri sebagai agen perubahan, namun fraksi PKS ketika mengusulkan agar Raperda secara eksplisit mengatur fasilitasi terhadap ketiga pilar tersebut secara berimbang. Agar kualitas dan keberlanjutan benar-benar terjaga.

- Merespon semangat Bupati dalam memberikan perlindungan terhadap Pesantren, Fraksi PKS – PPP menekankan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan Pesantren harus menjadi subtansi utama rencana peraturan daerah bukan sekedar pelengkap. Pandangan fraksi PKS – PPP secara tegas menyoroti pentingnya, a. Pos kesehatan pesantren atau Poskesstreng, b. Sanitasi dan kesehatan lingkungan, c. Fasilitas keselamatan dasar Kerjasama dan ruang belajar. Dengan masukan aspek ini secara eksplisit Raperda akan lebih sanggup dalam menjawab kebutuhan ril dari pesantren.
- Fraksi PKS – PPP sepakat dengan Bupati bahwa pesantren memiliki potensi ekonomi yang besar. Oleh karena itu Rancangan peraturan daerah perlu memberi ruang yang tegas terhadap, a. Pengembangan ekipesantren, b. Kewirausahaan santri, c. Koperasi pesantren dan UMKM halal, d. Kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting agar tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi dapat menjadi subjek penggerak umat dan ekonomi lokal.

• Agar dukungan pemerintah benar-benar mangkus dan berkeadilan. Fraksi PKS – PPP mengingatkan pentingnya, a. mekanisme verifikasi dan validasi data pesantren yang objektif, b. Keterbukaan Informasi Publik terkait bentuk dan fasilitasi, c. Penghindaran bantuan yang bersifat diskriminatif atau politis. Hal ini akan menjaga marwah rancangan peraturan daerah sebagai regulasi pelayanan publik bukan untuk kepentingan jangka pendek

• Fraksi PKS – PPP memandang bahwa keberhasilan Raperda sangat dibutuhkan oleh, a. sistem monitoring dan evaluasi berkala, b. Pelaporan kepada DPRD sebagai kontrol demokratis, c. Serta penjabaran lebih lanjut melalui peraturan bupati yang memuat rencana kerja, sumber pembibyaan dan indikator dampak, tanpa mekanisme ini Raperda berisiko hanya akan berhenti sebagai dokumen administratif, bukan kebijakan yang hidup dan memberikan dampak nyata

DPRD Sidoarjo masih dalam Raperda terkait fasilitasi pesantren. Kesimpulan, bahwa Fraksi PKS – PPP menilai bahwa pendapat Bupati telah memberikan pondasi politik dan moral yang kuat, bagi lahirnya rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pesantren. Namun pondasi tersebut perlu di pertegas melalui pengaturan yang operasional berukur dan berkelanjutan.

Sebelum rapat ditutup Abdillah Nasih selaku pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD Sidoarjo menyampaikan pendapat Bupati serta menyampaikan tanggapan dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa pembahasan Raperda tentang fasilitasi Pesantren perlu didalami lagi dan ditahas oleh komisi B selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.

Dengan demikian rapat Paripurna DPRD Sidoarjo rapat ke- tiga masa persidangan ke-dua tahun sidang tahun 2028, telah berakhir.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Minta Uji Ilmiah Dugaan Pencemaran Lingkungan Pabrik di Gedangan

GEDANGAN - Warga Desa Sruri, Kecamatan Gedangan, menyuarakan kegelisahan atas keberadaan pabrik kaca yang dituding menjadi sumber dampak lingkungan di wilayah mereka. Keluhan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Sidoarjo, yang menegaskan pentingnya penyelesaian berbasis data ilmiah.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, menekankan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi disikapi dengan asumsi atau pembelaan sepihak tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, konflik antara warga dan perusahaan hanya akan berlarut jika tidak ditopang data objektif.

"Kami ingin persoalan ini dibuktikan dengan data yang akurat, bukan sekadar alibi atau asumsi yang tidak mendasar," tegas Suyarno.

Ia menilai, DPRD tidak ingin menjadi arena saling klaim tanpa ujung. Tanpa dukungan bukti ilmiah, penyelesaian masalah dinilai mustahil tercapai.

"Kalau hanya berdasarkan asumsi, saya yakin siapa pun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan antara warga dengan perusahaan," ujarnya.

Terkait dugaan pencemaran udara, Suyarno menegaskan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) harus turun langsung ke lapangan. DLHK, menurutnya, memiliki kewenangan dan perangkat untuk mengukur baku mutu udara maupun aspek lingkungan lainnya secara objektif.

"Kalau memang ada dugaan polusi, DLHK wajib turun. Mereka punya alat ukur, bukan opini. DPRD menunggu berita acara resmi hasil pengujian di lapangan yang menjelaskan secara jelas apa sebenarnya persoalan yang dikeluhkan warga," tandasnya.

Meski demikian, Suyarno menegaskan DPRD tidak menutup mata terhadap pentingnya investasi. Ia mengakui setiap perusahaan memiliki hak mengembangkan usaha dan memanfaatkan lahan, selama tetap patuh pada ketentuan yang berlaku.

Namun ia mengingatkan, hak investasi tidak boleh mengabaikan hak warga untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman. Seluruh aktivitas industri, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang memuat kriteria dan ketentuan wajib bagi perusahaan.

"Investasi memang di-

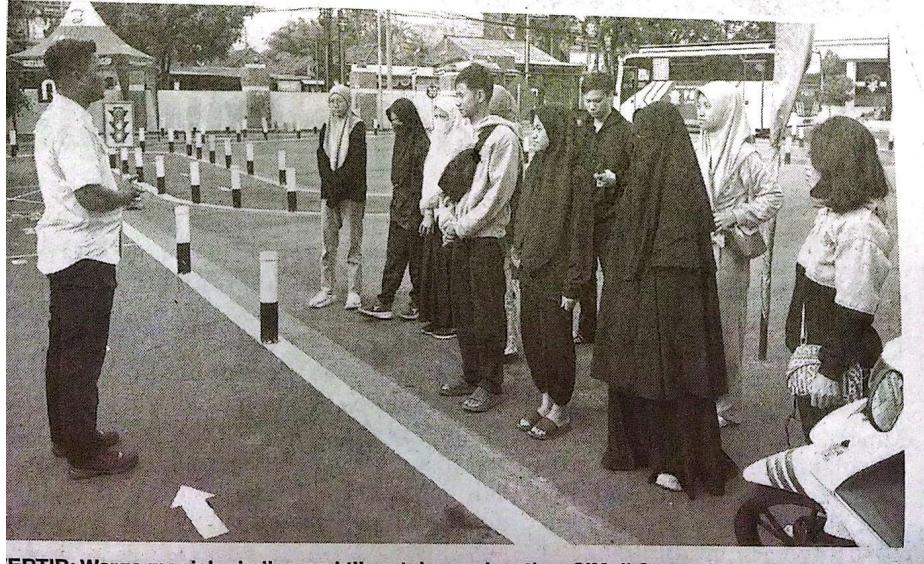
butuhkan daerah, tetapi tuntutan dan keselamatan warga juga harus diakomodasi. Ada aturan main yang tidak boleh dilanggar," katanya.

Suyarno juga menyebut lemahnya pendekatan sosial perusahaan terhadap warga sekitar. Ia mempertanyakan mengapa persoalan ini baru muncul, padahal pabrik tersebut telah beroperasi cukup lama.

"Perusahaan ini sudah lama berdiri. Pertanyaannya, kenapa sekarang baru muncul masalah? Ini menunjukkan pendekatan ke warga belum berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, M. Bahruni Aryawan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, wilayah tersebut pada prinsipnya hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha berskala kecil dengan sejumlah persyaratan ketat.

"Wilayah itu memang dapat digunakan untuk kegiatan usaha berskala kecil, namun harus memenuhi syarat tertentu, seperti pengelolaan IPAL, tingkat kebisingan, serta ketentuan teknis lainnya," jelas Bahruni saat hearing. (dik/vga)



ERTIR - Warga meminta uji ilmiah dugaan pencemaran lingkungan pabrik di Gedangan. (Foto: Radar Sidoarjo)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Setelah Bertahun-tahun Vakum, Pemkab Sidoarjo Hidupkan Kembali Car Free Day Awal Februari

 WartaTransparansi.Com
Minggu, 25 Jan 2026 - 14:18 WIB



SIDOARJO (WartaTransparansi.com) – Setelah bertahun-tahun mati suri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menghidupkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Sidoarjo pada awal Februari 2026. Kegiatan ini akan digelar usai upacara peringatan Hari Jadi Sidoarjo (Harjasda) dan dipusatkan di kawasan Alun-Alun hingga sepanjang jalan Gajah Mada.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Arif Mulyono, mengatakan bahwa CFD kali ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi warga, tetapi juga dimaksimalkan sebagai ruang sosial dan edukasi. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas taman baca digital.

"Kami mencoba menyiapkan fasilitas taman baca digital untuk menambah fungsi sosial dan edukasi ruang publik. Harapannya, masyarakat tidak hanya berolahraga, tetapi juga mendapatkan manfaat literasi," ujar Arif, Jumat (24/1). Selain taman baca, DLHK juga berencana menghadirkan mobil layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang hadir. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik selama CFD berlangsung.

Kembalinya CFD menjadi penanda bangkitnya kembali aktivitas masyarakat Sidoarjo setelah sempat vakum beberapa tahun. Berbagai kolaborasi lintas sektor telah disiapkan untuk menyukseksikan kegiatan ini. Pelaku UMKM, pekerja seni, rumah sakit, hingga perusahaan swasta akan dilibatkan guna menggerakkan roda ekonomi lokal dan memberi ruang ekspresi bagi masyarakat.



Sidak Layanan Pasien, Wabup Sidoarjo Apresiasi Pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong

 RepublikJatim.Com
Minggu, 25 Jan 2026 10:18 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan dengan mengunjungi sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo, Jumat (23/01/2026).

Dalam kunjungan itu, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menjenguk dua warga Porong yang sedang menjalani perawatan. Bahkan, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan di RS Pusdik Sabhara Porong berjalan dengan maksimal.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Mimik Idayana mengapresiasi pelayanan rumah sakit yang dinyaikan sudah sangat baik. Yakni mulai dari kebersihan lingkungan hingga sikap tenaga kesehatan dalam melayani pasien.

"Pelayanannya sudah bagus, rumah sakitnya juga bersih. Ini harus terus dipertahankan," ujar Mimik Idayana saat ditemui di sela-sela kunjungannya, Jumat (23/01/2026).

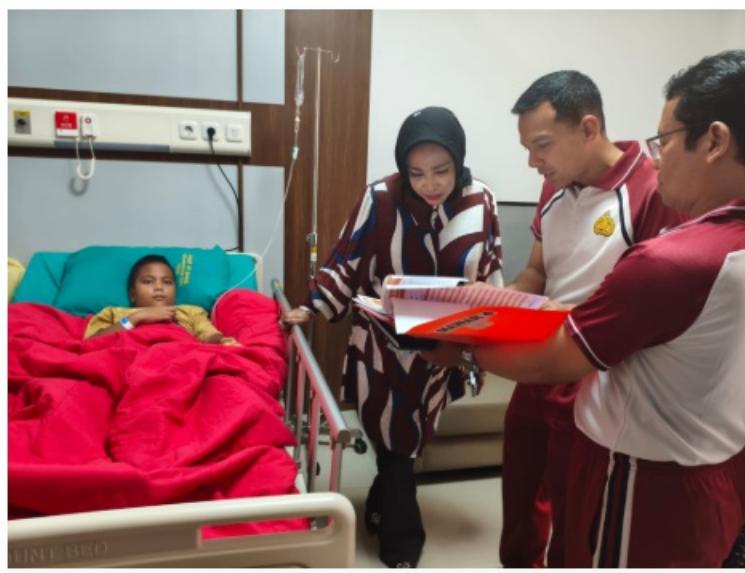
Mimik menjelaskan pelayanan menjadi hal utama yang harus diutamakan seluruh tenaga kesehatan. Menurutnya, keramahan dan sambutan yang baik kepada pasien maupun keluarga pasien memiliki peran penting dalam proses penyembuhan.

"Saya minta semua Tenaga Kesehatan (Nakes) melayani pasien dengan ramah. Sambutan senyum hangat itu juga bagian dari obat," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Mimik Idayana juga menyapa salah satu pasien anak, Arif Salman Agustian Alifikiq (8), siswa SD Juwet Konongo, Kecamatan Porong. Ia memberikan semangat agar Arif patuh minum obat dan makan sesuai anjuran dokter.



"Ayo makan yang banyak ya, biar cepat sembuh dan bisa sekolah lagi," ungkap Mimik menyemangati Arif.



Menurut Mimik Idayana, pelayanan yang baik dan sikap ramah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu untuk berobat dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada.



Sabtu, 24 Jan 2026 10:29 WIB
Peringatan Hari Gizi, SMP Al Muslim Gelar Healthy Day Bertema Smart Eating Strong Living

"Kalau pelayanannya baik, masyarakat akan merasa nyaman dan senang berobat ke sini. Ini juga menjaga nama baik rumah sakit itu," paparnya.

Secara tidak sengaja, Mimik Idayana juga menjenguk pasien anak dari anggota Patwal Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo yang tengah dirawat di rumah sakit milik Polri itu.

Dalam kunjungan itu, Wakil Bupati Sidoarjo didampingi Kepala Rumah Sakit Pusdik Bhayangkara Porong AKBP dr Zaid M Tr KK beserta jajaran manajemen rumah sakit. Diantaranya Waka Rumkit Kompol Tri Retno Utami, AKP Septa Nuraini sebagai Kasubag Wasintern. Ary/Waw

Editor : Redaksi

